

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 74

TAHUN 2008

Rio Tinto diminta berbagi konsesi di Lashampala

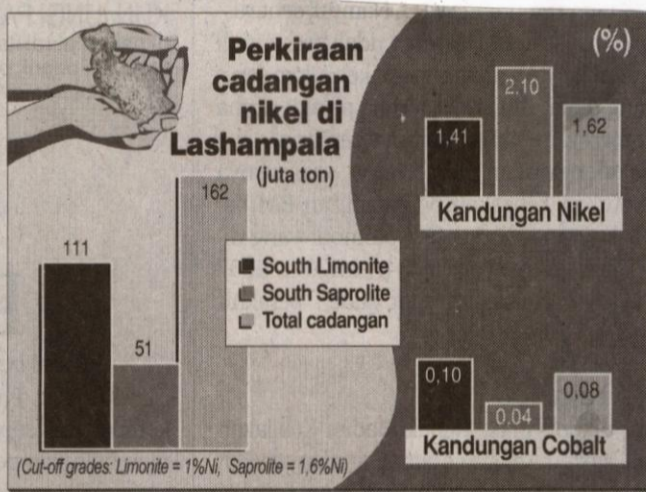
Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Rio Tinto dan Grup Bintangdelapan kemungkinan akan berbagi lahan konsesi nikel di Lashampala untuk mengakhiri kisruh yang melibatkan keduanya akibat tumpang tindih lahan di atas konsesi seluas 72.000 hektare.

Sejauh ini, di atas wilayah konsesi kontrak karya Rio Tinto sudah terdapat lima izin KP yang diterbitkan dan tiga berstatus usulan yang terletak di Morowali, Sulteng.

Perusahaan yang sama juga telah mengajukan tujuh proposal izin KP ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, bahkan beberapa KP dikabarkan sudah diterbitkan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu bara Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Mangantar S. Mar-



Sumber: Rio Tinto

BISNIS/FITRIYANA PULUNGAN

72

Marpaung menjelaskan solusi berbagi lahan dimungkinkan mengingat lahan konsesi cukup luas, yang potensinya terlalu tinggi untuk digarap oleh satu perusahaan, apalagi jika hanya diusahakan oleh Grup Bintangdelapan.

“Untuk satu KP seluas 5.000 ha saja, bisa terkandung cadangan sekitar 250 juta ton ore. Buat apa dikasih banyak-banyak [Grup Bintangdelapan].”

Pemerintah, lanjut Marpaung, akan memfasilitasi Rio Tinto, yang sudah berniat baik untuk berinvestasi di Indonesia, sejak harga nikel masih pada kisaran US\$2 per pon.

Dia memastikan perusahaan asal Australia itu akan mendapat porsi lebih besar dibandingkan dengan Bin-

tangdelapan.

Porsi lebih besar

“Pasti Rio Tinto akan dapat porsi lebih besar. Kita lihat saja nanti setelah tim turun dan membenarkan masalah ini. Investor jangan khawatir.”

Ketika dikonfirmasi, Manager External Affair Rio Tinto Budi Irianto enggan mengomentari soal perkembangan yang dilakukan pemerintah itu, karena belum mendapat informasi langsung dari tim bentukan pemerintah.

Rio Tinto, imbuhnya, baru akan memberikan respons setelah pihaknya diajak bicara. Dengan itu, lanjutnya, langkah hukum yang sebelumnya diajukan seharusnya masih tetap berjalan sesuai dengan jadwal.

“Kami belum diberi tahu, dan respons segera diberikan setelah kami ada pembicaraan [dengan tim pemerintah].”

Budi menjelaskan dengan terus tertundanya KK Rio Tinto di Lashampala bisa berakibat pada pembengkakan rencana investasi, yang semula ditaksir US\$1,5 miliar hingga US\$2 miliar. “Bisa saja terjadi [kenaikan investasi], oleh karena itu, kami harus melakukan *order of magnitude* untuk melihat model proyeknya,” jelasnya. (rudi.ariffianto@bisnis.co.id)

paung mengatakan pemerintah pusat yang terdiri dari Departemen ESDM, Depdagri, dan BKPM bersama kedua pemda telah membentuk tim bersama untuk mencari solusi dari kisruh tumpang tindih lahan itu.

Adanya perkembangan terbaru itu, lanjutnya, pendekatan hukum untuk penyelesaian kasus untuk sementara dihentikan.

“Sepekan lalu tim baru dibentuk. Mereka akan terjun ke lapangan untuk melihat kondisi riilnya. Rio Tinto harus hidup, begitu juga perusahaan yang sudah eksis. Ujungnya misalnya nanti Rio dapat wilayah sekian, sisanya pemilik KP,” katanya kepada *Bisnis*, kemarin.

Pada 23 Mei, penasihat hukum Rio Tinto Todung Mulya Lubis secara resmi mengajukan gugatan atas penerbitan KP di atas wilayah persetujuan prinsip KK Rio Tinto. Dalam gugatannya disebutkan penerbitan KP di atas sebagian besar wilayah KK Rio Tinto tidak sah.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 22

TAHUN 2008

Mendag Tunjuk 5 Surveyor Verifikasi Ekspor Tambang

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu menunjuk lima perusahaan surveyor di Indonesia untuk melakukan penelusuran teknis (verifikasi) ekspor produk pertambangan tertentu. Penunjukan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No 348/M-DAG/6/2008 tentang Penetapan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu yang ditandatangani pada 27 Juni 2008.

Perusahaan yang ditunjuk Mendag tersebut adalah PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT Carsurin, PT Geoservice, dan PT Citra Buana. Kelima perusahaan itu resmi mendapatkan mandat Mendag pada tanggal ditetapkan peraturan baru itu.

“Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 14/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambang-

an Tertentu, perlu ditetapkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi itu,” kata Mendag dalam peraturan tersebut.

Menurut kepmendag itu, lima perusahaan surveyor yang ditunjuk mengajukan permohonan sebagai pelaksana verifikasi data ekspor produk tambang tertentu. PT Sucofindo mengajukan permohonan pada 16 Mei 2008, PT Surveyor Indonesia mengirimkan permohonan pada 19 Mei 2008, dan PT Carsurin mengajukan permohonan pada 2 Juni 2008. Sedangkan PT Geoservices dan PT Citra Buana mengirimkan permohonan masing-masing pada 12 dan 13 Juni 2008.

Selanjutnya, surveyor bertugas untuk melakukan verifikasi secara fisik dan dokumen ekspor produk tambang tertentu dan menyampaikan laporan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Depdag, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi ESDM, serta Direktur Pembinaan Pengusaha-

an Mineral dan Batubara. Laporan tersebut berisi antara lain nama dan alamat eksportir, jenis produk pertambangan tertentu, keabsahan administrasi sumber barang, uraian dan spesifikasi barang (no HS), volume, waktu pengapalan, serta negara tujuan ekspor.

Sebelumnya, Depdag mewajibkan verifikasi ekspor semua bahan tambang, kecuali minyak bumi dan gas. Kewajiban verifikasi tersebut ditujukan untuk mencegah ekspor bahan tambang secara ilegal serta mengurangi dampak kerusakan lingkungan karena kegiatan penambangan secara liar.

“Di samping itu, kami juga ingin memiliki data ekspor bahan tambang secara lengkap. Data tersebut diperlukan untuk mengambil kebijakan selanjutnya di masa depan antara lain mengarahkan ekspor komoditas bahan tambang dalam bentuk olahan,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Depdag Diah Maulida.

Dia menuturkan, aturan verifikasi yang diterbitkan pada 5 Mei 2008 itu efektif

berlaku dua bulan kemudian, yaitu 5 Juli 2008. “Waktu dua bulan itu akan digunakan untuk sosialisasi aturan ini kepada eksportir yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dan mempersiapkan surveyor yang melakukan verifikasi itu,” kata dia.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia pada 2007 mencapai US\$ 92 miliar yang terdiri atas ekspor produk manufaktur sebesar US\$ 75,9 miliar, bahan tambang sebesar US\$ 12,2 miliar, dan produk pertanian sebesar US\$ 4 miliar. Ekspor bahan tambang antara lain terdiri atas ekspor bijih tembaga sebesar US\$ 7,9 miliar, batubara sekitar US\$ 7 miliar, nikel sebesar US\$ 2,3 miliar, dan timah sebesar US\$ 1,2 miliar.

“Aturan ini dapat meningkatkan nilai ekspor karena yang selama ini mungkin tidak tercatat menjadi tercatat. Namun, di sisi lain bisa juga menurunkan ekspor karena eksportir memerlukan beberapa waktu untuk menyesuaikan diri dengan aturan ini,” ujar Diah. (naf)

73

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																								
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">JAN</td> <td style="width: 10%;">FEB</td> <td style="width: 10%;">MAR</td> <td style="width: 10%;">APR</td> <td style="width: 10%;">MEI</td> <td style="width: 10%;">JUN</td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; border-radius: 50%; text-align: center;">JUL</td> <td style="width: 10%;">AGST</td> <td style="width: 10%;">SEPT</td> <td style="width: 10%;">OKT</td> <td style="width: 10%;">NOV</td> <td style="width: 10%;">DES</td> </tr> <tr> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td> <td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31														
HALAMAN : 9 TAHUN 2008																									

Aturan DMO Batubara Ditargetkan Rampung Juli

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Ditjen Minerpabum, Departemen ESDM MS Marpaung menyatakan, Pemerintah menargetkan penyusunan aturan wajib pasok dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) batubara dirampungkan dalam bulan ini (Juli).

Menurut dia, aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Menteri dan dilengkapi sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pasok dalam negeri. "Nanti di dalam aturannya akan ada sanksi juga, antara lain sanksi administratif atau nanti jatahnya (ekspor) dikurangi," jelas Marpaung.

Marpaung menjelaskan tanpa aturan baru pun, secara prinsip sudah ada keharusan DMO bagi perusahaan batubara yang terikat kontrak PKP2B dengan pemerintah.

"Jadi, perlu ada aturannya karena kewajiban DMO bagi pemegang Kuasa Pertambangan (KP) belum ada. Sedangkan untuk perusahaan pemegang PKP2B sudah ada dalam kontraknya bahwa dia wajib penuhi kebutuhan dalam negeri dulu," paparnya.

74

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF											
<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI											
<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM											
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 20										TAHUN 2008	

Pajak Rio Tinto Ditolak

JAKARTA – Komisi VII DPR menolak pemberlakuan sistem pajak tetap kendati regulasi berubah (*nail down*) kepada Rio Tinto yang akan mengeksploitasi tambang nikel di Lasamphala, di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Dewan juga meminta pemerintah sebaiknya membatalkan penerapan sistem pajak tersebut. Rezim pajak tersebut dinilai merugikan Indonesia di tengah naiknya komoditas tambang diperdagangan internasional.

Penolakan disampaikan anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edi (Fraksi PAN), Effendi MS Simbolon (Fraksi PDI Perjuangan), dan Achmad Farihal (Fraksi PPP). Ketiganya dihubungi secara terpisah oleh *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (1/7).

Sebelumnya, pemerintah dan Rio Tinto sepakat menggunakan sistem pajak *nail down* di tambang nikel Lasamphala. Keputusan menggunakan *nail down* disepakati dalam rapat koordinasi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri terkait.

Tjatur mengatakan, kebijakan pemerintah menerapkan pajak *nail down* menandakan lemahnya posisi tawar pe-

merintah terhadap kontraktor pertambangan asing. Kendati pemerintah mencari investor pertambangan, bukan berarti pemerintah langsung mengiyakan apa keinginan investor asing tersebut.

“Pemerintah jangan gegabah untuk membuat keputusan, dan ini harus dikaji ulang. Pada rapat dengan dewan pada 9 Juli 2008 nanti kami akan membahas hal tersebut,” kata Tjatur.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII Achmad Farihal, pemerintah harus mencontoh negara lain ketika menetapkan kebijakan mengenai pajak. Kalau pajak makin besar, makin besar pula pendapatan negara.

Kendati begitu, Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto berpendapat, keputusan pemerintah menetapkan pajak *nail down* di Lasamphala sudah tepat. Rezim pajak *nail down*, pajak yang diterima pemerintah akan lebih tinggi dibanding dengan sistem *prevailing*.

Lasamphala merupakan tambang nikel berkadar rendah, sekitar 0,91%. Kandungan nikelnya diperkirakan mencapai 47.000 metrik ton. Nilai pengembangan tambang tersebut ditaksir US\$ 2 miliar atau sekitar Rp 18,4 triliun. (her)

75